

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberadaan pariwisata sangat erat hubungannya dengan *SDGs*. Adanya pariwisata akan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian *SDGs*. Namun di sisi lain, pariwisata juga bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut apabila pariwisata tidak dikelola dengan baik dan benar. Pariwisata yang dikelola dengan baik akan dapat menjangkau berbagai target seperti pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, modal untuk pengembangan kesehatan masyarakat yang lebih baik, timbulnya inovasi dan industri penunjang, memacu adanya konsumsi dan produksi yang lebih bertanggungjawab. Selain itu pariwisata juga akan memacu adanya kesetaraan gender dengan adanya pelibatan berbagai pihak dalam aktivitas pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Industri pariwisata saat ini seakan menunjukkan diri menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi devisa negara. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki sejuta keunikan dan keindahan didalamnya. Terutama sangat terkenal dengan keindahan alamnya yang membuat banyak terdapat destinasi pariwisata di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dapat menarik perhatian baik itu wisatawan asing maupun wisatawan dari

dalam negeri. Bahkan pada tahun 2019 indeks daya saing pariwisata Indonesia naik dua posisi dalam kategori *Travel and Tourism Competitive Index (TTCI)* yang di rilis oleh *World Economic Forum (WEF)*. Setelah sebelumnya diposisi ke-42 pada tahun 2017 menjadi posisi ke-40 pada tahun 2019 dari 140 negara di dunia. Kenaikan ini terbilang cukup baik mengingat persaingan pariwisata global yang sangat ketat.

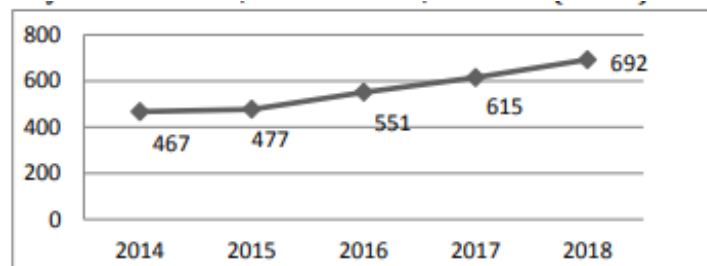
Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan *World Tourism Organization (WTO)*, telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azazi manusia, sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt dalam bukunya *Global Paradox* yakni bahwa “*we here once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right*”. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk pula Indonesia.

Kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata juga merupakan sektor yang cukup menjanjikan dan dapat menjadi strategi

bagi negara untuk mengembangkannya karena dapat menambah sumber pajak dan pendapatan bagi negara. Tidak hanya mendatangkan manfaat bagi negara, pengembangan sektor pariwisata juga bermanfaat untuk masyarakat karena dengan adanya pariwisata secara tidak langsung masyarakat akan terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata tersebut, sehingga ada wujud timbal balik antara masyarakat dan pariwisata. Bahkan sektor pariwisata dapat dikatakan mempunyai kekuatan yang cukup besar yang dapat membuat masyarakat setempat mengalami perubahan berbagai aspek dalam kehidupan mereka.

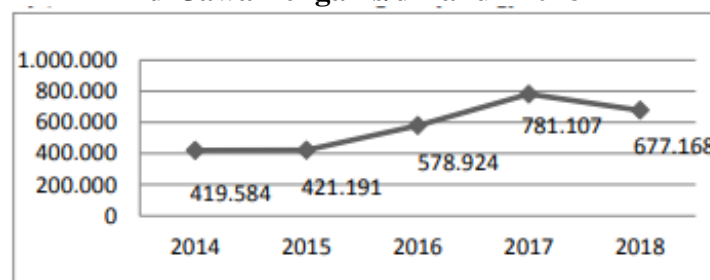
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan wisata dan menikmati maraknya perkembangan industri pariwisata. Terdapat banyak kekayaan alam, seni dan budaya di Jawa Tengah yang dikemas dan dikembangkan menjadi aset pariwisata baik itu berskala nasional bahkan internasional yang akhirnya akan menarik minat wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Berbagai destinasi wisata yang terdapat di kabupaten/kota Jawa Tengah merupakan destinasi wisata yang menarik dan mengedukasi, seperti tempat wisata alam, wisata edukasi, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata bahari dan desa wisata. Perkembangan pariwisata di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 1.1
Daya Tarik Wisata, Minat Khusus,
dan lain lain (Usaha) Pariwisata di Jawa Tengah



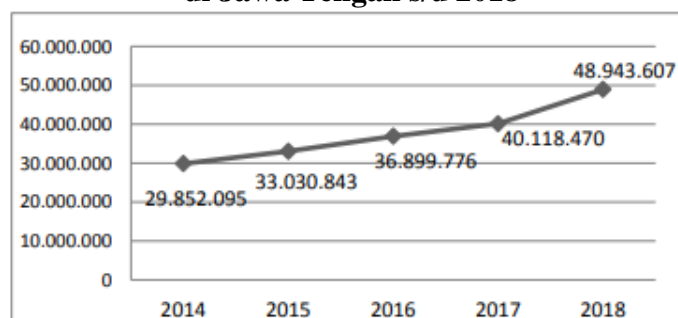
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.2
Jumlah Wisatawan Mancanegara
di Jawa Tengah s/d Tahun 2018



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.3
Jumlah Wisatawan Domestik
di Jawa Tengah s/d 2018



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dari ketiga grafik di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan pariwisata di Jawa Tengah tiap tahunnya, baik dari pengembangan

pariwisatanya maupun dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki daya tarik dan pesona yang dapat menarik wisatawan untuk dikunjungi.

Kota Semarang saat ini sedang mengencarkan pengembangan pada sektor pariwisatanya. Upaya pengembangan kepariwisataan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025. Kota Semarang kaya akan destinasi wisata yang menarik mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, hingga wisata buataannya, tak heran jika Kota Semarang memiliki potensi pariwisata yang beragam untuk dikembangkan. Data mengenai perkembangan pariwisata di Kota Semarang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Daya Tarik Wisata Kota Semarang

No	Obyek Wisata	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Obyek Wisata Alam	5	5	5	6
2.	Obyek Wisata Budaya	11	11	11	11
3.	Obyek Wisata Buatan	10	10	10	12
4.	Minat Khusus	-	-	-	-
5.	Lain – Lain	10	12	14	14
	Jumlah	36	38	40	43

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2015-2018

Berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan dalam daya tarik wisata di Kota Semarang hingga pada tahun 2018. Pada tahun 2015 Kota Semarang hanya memiliki 36 daya tarik wisata, lalu pada tahun 2016 ditambah dengan dua obyek wisata baru sehingga menjadi 38 obyek wisata. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat kenaikan obyek

wisata menjadi 40 obyek wisata dan pada tahun 2018 menjadi 43 obyek wisata. Dengan adanya peningkatan disetiap tahunnya hal ini dapat diartikan bahwa sudah adanya pengelolaan obyek wisata yang baik dan beragam. Hal ini tentu akan berimbas pada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung pada Kota Semarang baik wisatawan mancanegara maupun domestik.

Tabel 1.2
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kota Semarang

Tahun	Wisman	Persentase Pertumbuhan	Wisnus	Persentase Pertumbuhan	Total
2015	16.518	-	2.853.564	-	2.870.082
2016	101.756	516%	3.023.441	5,9%	3.125.197
2017	99.282	-2,43%	4.198.584	38,86	4.297.866
2018	66.107	-33,41%	5.703.282	35,84%	5.769.389

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2015-2018

Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah pengunjung meningkat dari tahun ke tahun. Namun apabila dilihat pada wisatawan mancanegara, peningkatannya tidak terlalu signifikan dan bahkan sempat menurun drastis. Seperti pada tahun 2018 yang mengalami penurunan sebesar 33,41% dengan jumlah wisatawan hanya 66.107. dapat dikatan bahwa daya tarik wisata memang sangat berpengaruh bagi kenaikan jumlah wisatawan di Kota Semarang.

Kota Semarang cukup banyak memiliki destinasi wisata salah satunya adalah Desa Wisata. Setidaknya, terdapat 165 desa wisata maupun kampung tematik yang tersebar diseluruh wilayah Kota Semarang (jateng.tribunnews.com). Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi,

sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya (Pariwisata Inti Rakyat dalam Priasukmana dan Mulyadin, 2001:38).

Salah satu desa wisata yang ada di Kota Semarang yaitu Desa Wisata Wonolopo. Desa Wisata Wonolopo terletak di kelurahan Wonolopo, kecamatan Mijen yang berjarak 18km dari pusat kota. Kondisi alam di Kelurahan Wonolopo masih memiliki dataran hijau untuk pertanian dan memiliki luas wilayah 400,38 hektar. Kelurahan Wonolopo di tetapkan sebagai Desa Wisata pada Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012 bersamaan dengan Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Nongkosawit. Dengan di tetapkannya Kelurahan Wonolopo sebagai Desa Wisata diharapkan agar kedepannya dapat memanfaatkan, mengembangkan dan menjual potensi-potensi yang dimiliki Kelurahan Wonolopo. Alasan peneliti mengambil lokus di Desa Wisata Wonolopo adalah dengan pertimbangan bahwa dari tiga Desa Wisata yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012 ada yaitu Desa Wisata Kandri dan Nongkosawit, Desa Wisata Wonolopo yang perkembangannya kurang optimal.

Wilayah Desa Wisata Wonolopo terbagi menjadi 10 RW, masing-masing RW memiliki ciri khas yang berbeda-beda sehingga tiap-tiap RW memiliki keunikan tersendiri yang dapat dikembangkan. Mulai dari

RW 1 yang terdapat agro durian, agro salak dan lokasi pelaksanaan *nyadran sentono*. Di RW 2 terdapat kampung damai. Lalu di RW 3 adanya budidaya bebek dan lokasi Griya Pawening Jati. Di RW 4 terdapat wisata kerajinan yang berbahan dasar dari sapu ijuk. Di wilayah RW 5 menjadi lokasi Pendopho Kinanti. Selanjutnya di RW 6 terdapat budidaya jamur tiram, gamelan, kampung hijau, camp david, kesenian jathilan, kesenian Ronggoseo Ngudi Budoyo (eblek). Di wilayah RW 7 terdapat agro rambutan, musik gamelan dan tarian pencak. Di wilayah RW 8 terdapat Embung Wonolopo dan budidaya pembibitan buah. Di RW 9 terdapat kesenian tek-tek Pring Pethuk. Dan terakhir RW 10, yang terdapat kampung jamu dan pohon joho.

Harapan dengan adanya Kelurahan Wonolopo di tetapkan sebagai sebuah Desa Wisata tidak lain agar masyarakat Wonolopo dapat melestarikan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada, mendorong pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Wonolopo. Namun, hal itu hanya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat saja, belum sepenuhnya masyarakat Wonolopo dapat merasakan manfaat dari adanya Desa Wisata Wonolopo.

Kegiatan pariwisata tidak hanya didukung oleh potensi yang ada saja, tetapi didukung pula oleh ketersediaan aksesibilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang baik. Aksesibilitas pada Desa Wisata Wonolopo juga belum optimal, dan masih ada yang perlu dibenahi seperti akses jalan yang sempit, tidak adanya papan penunjuk arah. Desa

Wisata Wonolopo juga belum melibatkan banyak pihak untuk menjalin kerjasama atau kemitraan seperti CSR.

Selain itu terdapat banyak faktor, baik itu faktor pendukung maupun penghambat yang menyebabkan mengapa pariwisata di Desa Wisata Wonolopo ini belum bisa berkembang dengan baik. Pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Masyarakat lokal mempunyai peran penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Dari hasil pra *survey* di lapangan inilah yang dapat menjadi identifikasi menjadi permasalahan yang ada di Desa Wisata Wonolopo. Peneliti akan memfokuskan pada masalah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo yang belum optimal yang akan dianalisis menggunakan 6 Komponen Pengembangan Pariwisata yaitu *Attraction* (Atraksi), *Accessibilities* (Akses), *Amenities* (Fasilitas pendukung), *Accommodation* (Akomodasi), *Activity* (Aktivitas) dan *Ancillary Service* (Layanan Tambahan), juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata Di Desa Wisata Wonolopo.

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu dalam rangka supaya Desa Wisata Wonolopo tidak tertinggal dengan dua desa wisata lainnya dan juga dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Semarang, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Wisata Wonolopo dengan mengambil judul penelitian **“Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh khususnya tentang

pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

b. Bagi Pemerintah/Masyarakat

Untuk memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

c. Bagi Lembaga Akademik

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu serta sebagai dasar untuk penelitian yang relevan selanjutnya mengenai pengembangan pariwisata.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya manajemen publik.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini menjadikan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori dan menjadi referensi yang relevan bagi penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal maupun skripsi yang terkait dengan penelitian yang ditulis peneliti.

Tabel 1.3
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul	Metode Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Hugo Itamar, A. Samsu Alam dan Rahmatullah (2014) <i>“Strategi Pengembangan Pariwisata di</i>	Penelitian deskriptif dengan metode Observasi dan Wawancara langsung	Ada 7 strategi pokok yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja yaitu: 1. Strategi dasar yang bersifat multipler effect atau strategi dengan berbagai efek. 2. Strategi terkait dengan pengelolaan	Ketujuh strategi ini kemudian dapat dievaluasi bahwa telah dilaksanakan namun ada yang berjalan secara maksimal ada juga yang belum berjalan secara maksimal disebabkan oleh beberapa faktor

	<p><i>Kabupaten Tana Toraja”</i></p> <p>(Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2)</p>		<p>interest pariwisata;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Strategi keterkaitan dan pengembangan produk; 4. Strategi pemantapan pemasaran; 5. Strategi pengembangan sumber daya manusia; 6. Strategi spasial pengembangan wisata; 7. Strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi <p>- Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alam dan Budaya 2. Kondisi Masyarakat 3. Objek wisata 4. Promosi pasar pariwisata <p>-Faktor Penghambat:</p>	
--	--	--	---	--

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan dan Sarana prasarana 2. SDM 3. Peraturan dan Landasann hukum 4. Pengelolaan objek wisata 	
2	<p>Sefira Ryalita Primadany,Mardiyono dan Riyanto</p> <p><i>“Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)”</i></p> <p>Jurnal Administrasi</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan pariwisata daerah, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata; 2. Pengembangan objek wisata daerah; 3. Peningkatan peran serta masyarakat; dan 4. Peningkatan peran serta pihak swasta. <p>-Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek wisata 	<p>Dari Keempat objek wisata di Kabupaten Nganjuk (Air Terjun Sedudo, Air Merambat Roro Kuning, Goa Margotresno, dan Taman Rekreasi Anjuk Ladang). Masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk masih kurang optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki di tiap objek wisata tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk masih belum maksimal dalam melakukan</p>

	Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 135-143		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peran pemerintah 3. Koordinasi antar pihak 4. Adanya regulasi yang jelas <p>-Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana 2. Lokasi objek wisata 3. Status kepemilikan lahan dengan pihak lain 	<p>pengembangan objek wisata Nganjuk. Buktinya belum berjalannya program-program terkait pengembangan wisata daerah karena terhalang dengan dana yang terbatas, sedangkan objek wisata yang perlu perbaikan dan pengembangan banyak.</p>
3	<p>Sri Rahayu Budiani, dkk. (2018)</p> <p><i>(“Analisis Potensi dan Strategi Pengembangann Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas</i></p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atraksi dan keunikan wisata 2. Sumberdaya manusia <p>Prinsip <i>community based tourism</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan akomodasi 2. Promosi 3. Pengembangan industri dan 	<p>Potensi objek wisata Desa Sembungan memiliki daya tarik wisata yang hingga saat ini belum dikembangkan. Potensi wisata yang ada selain Telaga Cebong dan Bukit Sikunir, yaitu Camping Ground Telaga Cebong, Air Terjun Sikarim, Air Terjun Cilaka Sipendok, dan Wisata Tracking Gunungapi Pakuwojo, agroedutourism dan</p>

	<p><i>di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah</i>)</p> <p>Majalah Geografi Indonesia Vol. 32, No.2, (170 - 176)</p>		<p>pertanian,serta</p> <p>4. Sarana transportasi.</p>	<p>agrotourism, wisata makam Joko Sembung, gardu pandang, Tari Imo-imo dan Tarian Ludrak serta Adat Ruwatan Rambut Gimbal, serta pasar wisata dan industri rumahan. Karakteristik pariwisata berdasarkan indikator pariwisata berkelanjutan di Desa Sembungan menunjukkan perlunya banyak pembenahan untuk dapat mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Diantaranya dilihat dari segi atraksi wisata dan keunikan wisata, serta sumberdaya manusia. Pengelolaan pariwisata di Desa Sembungan masih kurang optimal. Terdapat Beberapa aspek, terutama Pengembangann</p>
--	---	--	---	---

				sumberdaya manusia yang perlu diarah-kembangkan untuk mendukung pariwisata berbasis komunitas di Desa Sembungan, antara lain aspek pelayanan dan akomodasi, promosi, Pengembangann industri dan pertanian, serta sarana transportasi.
4	Elielsen Lase, Marlon Sihombing dan Husni Thamrin (2018) <i>“Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias”</i> Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 4	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis SWOT - Faktor Pendorong <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek geografis 2. Aspek sosial budaya - Faktor Penghambat <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek ekonomi 2. Aspek sumber daya manusia 	Dengan pengembangan kawasan wisata ini akan memungkinkan bahwa kawasan wisata SOZIONA (Somi-Bozihona-Onolimbu-Nalawo) akan menjadi kawasan wisata nomor satu di Pulau Nias. Strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nias yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal diwilayah SOZIONA agar

	(1):126-138.			<p>masyarakat lebih mendukung dan membantu pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Adapun strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan promosi wisata dan mencari investor yang tertarik untuk menanamkan modal dalam membangun kawasan SOZIONA. Sehingga baik Pemerintah daerah maupun investor dapat saling bekerjasama agar kawasan ini cepat terrealisasikan dengan baik. Faktor pendorong dalam pengembangan pariwisata SOZIONA adalah bahwa daerah Kabupaten Nias merupakan daerah yang memiliki keindahan alamnya yang tidak perlu diragukan</p>
--	--------------	--	--	--

				<p>lagi, selainitu masyarakat Kabupaten Nias yang merupakan masyarakat yang berbudaya dan masyarakat yang ramah dapat menjadi hal yang sangat mendukung dalam proses pengembangan kawasan wisata SOZIONA Kabupaten Nias. Sedangkan Faktor Penghambat dari proses pengembangan kawasan SOZIONA adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang terdapat di setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Nias masih dirasa kurang serta kebersihan wilayah yang masih belum terjaga dengan baik.</p>
5	Wiwit Nugroho dan	Studi literatur dengan	Teori komponen pariwisata 6A:	Berdasarkan hasil analisis 6 komponen pariwisata di atas, dapat diketahui

	<p>Rara Sugiarti</p> <p>“Analisis Potensi Wisata Kampung Sayur Organik Ngemplak Sutan Mojosongo Berdasarkan Komponen Pariwisata 6A”</p> <p>Artikel Universitas Sebelas Maret</p>	<p>pendekatan kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Attraction</i> 2. <i>Accomodation</i> 3. <i>Amenities</i> 4. <i>Ancillary services</i> 5. <i>Activity</i> 6. <i>Accessibilities</i> 	<p>komponen vital didalam kawasan kampung sayur organik ngemplak sutan ini adalah, atraksi, aksesibilitas, aktivitas dan <i>ancillary services</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atraksi yang ada di kampung ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam memilih lokasi wisata, konsep kampung sayur organik atau urban farming sangat menarik untuk dapat dipahami bahkan dikembangkan di kawasan lain. 2. Aksesibilitas menuju kawasan ini tergolong kurang terjangkau, dikarenakan sifat sebuah kampung dimana kendaraan roda empat membutuhkan aksesibilitas yang tinggi.
--	---	------------------------------	--	---

				<p>3. Aktivitas pada kampung ini merupakan salah satu hal yang dapat dipilih menjadi aktivitas wisata alternatif dengan tema pertanian atau perkebunan dimana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kegiatan tersebut.</p> <p>4. Yang terakhir adalah <i>ancillary services</i> dimana dukungan dari pihak luar baik pemerintah kota ataupun swasta sudah sangat baik dalam membantu kampung ini tumbuh sesuai dengan yang diharapkan oleh warga sekitar.</p>
6	Robby Kurniawan Junaidy,dkk. (2019) <i>(“Manajemen</i>	Deskriptif Kualitatif	Teori George Robert Terry: 1. <i>Planning</i> , 2. <i>Organizing</i> ,	Fungsi Perencanaan yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Pekanbaru dalam mengelola dan mengembangkan Desa

<p><i>Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Di Desa Wisata Okura Kota Pekanbaru Provinsi Riau”</i></p> <p>Majalah Ilmiah BIJAK Vol. 16, No. 1, pp. 12 – 22</p>		<p>3. <i>Actuating,</i> 4. <i>Controlling</i></p> <p>Faktor pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kondisi geografis -Sosial budaya <p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sarana prasaran -Kualitas SDM 	<p>Wisata Okura belum berjalan dengan optimal dan masih perlu ada perbaikan.</p> <p>Fungsi Pengorganisasian yang dilakukan melalui seksi yang mewakili fokus program kerja masingmasing, terdiri dari seksi promosi pariwisata, seksi sarana dan prasarana dan seksi rekreasi hiburan.</p> <p>Fungsi Penggerakan telah dilakukan oleh Disbudpar Kota Pekanbaru dengan cara berkomunikasi dan memberikan arahan langsung kepada masyarakat di Desa Okura, bekerjasama dan memberikan informasi bahwa Desa Okura akan dikembangkan menjadi destinasi desa wisata berbasis kearifan</p>
--	--	--	--

				<p>lokal di Kota Pekanbaru.</p> <p>Fungsi Pengawasan atau Pengendalian diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, telah menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pengendalian, dengan berkordinasi bersama Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa Okura dan Kelompok Peduli Wisata agar memantau dan mengawasi pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Okura.</p>
7	<p>Yessi Fitriani dan Samsul Ma'arif (2017)</p> <p><i>(“Manfaat</i></p>	<p>Kualitatif dan Kuantitatif</p>	<p>Komponen produk wisata menurut Hadiwijoyo (2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atraksi - Aksesibilitas - Aktivitas (kelembagaan) 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Wonolopo cukup memberi manfaat di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Di bidang sosial, potensi kesenian</p>

	<p><i>Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal</i>)</p> <p>Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol.5 Nomor 1, 29-44</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi 	<p>semakin dilestarikan dan menjadi kekhasan lokal, adanya peningkatan keterampilan yang dimiliki masyarakat dan partisipasi masyarakat meningkat. Di bidang ekonomi, potensi lokal yang awalnya tidak dimanfaatkan kini dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat dan peluang usaha bagi masyarakat semakin tinggi. Di bidang lingkungan, keberadaan desa wisata mendorong peningkatan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas.</p>
8	<p>Rezza Abdy Pradana (2016)</p> <p><i>“Analisis Program Pembangunan Desa</i></p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Faktor penghambat program pembangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konflik internal - Pengelolaan dana kurang tepat - Koordinasi kurang baik 	<p>Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tidak berkembangnya program desa wisata yang ada di Kelurahan Wonolopo terdapat permasalahan pada internal Kelompok Sadar Wisata</p>

	<p><i>Wisata Wonolopo di Kota Semarang</i>)</p> <p>Skripsi, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya fasilitas pendukung - Kurangnya promosi 	<p>Wonolopo itu sendiri. Permasalahan tersebut diawali dengan tidak tepatnya pengelolaan dana yang didapat melalui bantuan PNPM Pemerintah Pusat oleh salah satu kelompok orang dalam Kelompok Sadar Wisata tersebut. Selain itu, adanya pengawasan yang kurang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap Kelompok Sadar Wisata Wonolopo. Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak dan tidak terdapat arah penunjuk jalan. Sehingga pembenahan dari dasar sangat diperlukan agar Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Seperti</p>
--	---	--	--	---

				<p>pengelolaan yang lebih profesional di Kelompok Sadar Wisata Wonolopo, pembenahan infrastruktur jalan dan diberikan penunjuk jalan dan promosi berwisata ke Desa Wisata Wonolopo yang harus ditingkatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Sehingga program desa wisata di Kelurahan Wonolopo bisa dipertahankan dan dikembangkan.</p>
9	<p>Tri Yuniningsih dan Nadia Isnaini Putri (2019)</p> <p><i>“Pseudo-Participation dalam Pengembangan</i></p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>- Tiga kriteria <i>Authentic Participation</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumbangsih terhadap usaha pengembangan 2. Penerimaan manfaat secara merata, 3. Pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program 	<p>. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat desa wisata Wonolopo adalah <i>pseudo-participation atau partisipasi semu</i>, hal ini didasarkan pada tiga kriteria <i>Authentic Participation</i> yaitu</p>

<p>Pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah”)</p> <p>Artikel, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.</p>		<p>-Faktor pendukung</p> <p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan masyarakat terhadap program <p>Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah 2. Promosi di media massa <p>-Faktor penghambat :</p> <p>Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM <p>Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan yang diberikan dinas 	<p>sumbangsih terhadap usaha pengembangan Desa Wisata Wonolopo, penerimaan manfaat secara merata, dan pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Wonolopo terdapat satu kriteria yang belum terpenuhi yaitu masih ada warga Desa Wisata Wonolopo tidak menerima manfaat langsung yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Wonolopo.</p>
--	--	--	---

			<p>kurang inovatif</p> <p>2. Masih terdapat sikap individualis dalam masyarakat</p>	
10	<p>Iis Istiqomah, dkk. (“<i>Gemakan Gerakan Ndulang Dewis : Sebagai Pemanfaatan Potensi Desa Untuk Dijadikan Ikon Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen</i>”)</p> <p>Artikel Departemen Teknologi Pangan Fakultas Ilmu</p>	<p>Pendekatan <i>Participatory Learning</i></p>	<p><i>Prinsip learning by doing</i> melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Pembinaan 3. Demonstrasi dan 4. Simulasi. 	<p>Adanya perubahan mindset masyarakat untuk sadar mengolah potensi lokal desa untuk dijadikan produk bernilai jual di lingkungan RW.</p>

	Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang			
11	<p>Gareth Butler dan Christian M Rogerson (2016)</p> <p><i>“Inclusive local tourism development in South Africa: Evidence from Dullstroom”</i>)</p> <p><i>Local Economy</i>, Vol. 31(1–2) 264–281</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Kualitatif</p>	<p>-Dalam mencapai tujuan inklusif ada peran penting untuk tingkat pemerintah nasional dan lokal serta sektor swasta.</p> <p>-Menyoroti potensi pertumbuhan yang dimiliki beberapa penduduk lokal di tempat kerja mereka melalui pekerjaan di bidang pariwisata.</p> <p>- Beberapa orang yang diwawancarai bekerja untuk bisnis pariwisata di <i>Dullstroom</i>, menyatakan bahwa atasan mereka telah menempatkan mereka melalui skema pelatihan intensif di rumah yang</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan pengembangan pariwisata di <i>Dullstroom</i> memberikan serangkaian manfaat ekonomi dan sosial yang positif bagi penduduk setempat dan bahwa kota kecil ini menunjukkan bukti lintasan inklusif pengembangan pariwisata.</p>

			meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan (Butler, 2013).	
12	<p>Suzanne Wilson, et al. <i>(“Factors for Success in Rural Tourism Development”)</i> <i>Journal of Travel Research</i>, Vol. 40, November 2001, 132-138</p>	<p><i>Focus Grup Discussion</i></p>	<p>10 faktor yang paling penting untuk keberhasilan pengembangan pariwisata di daerah pedesaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paket wisata yang lengkap 2. Kepemimpinan yang baik 3. Dukungan dan partisipasi pemerintah daerah 4. Dana yang cukup untuk pengembangan pariwisata 5. Perencanaan strategis 6. Koordinasi dan kerja sama antara pelaku bisnis dan kepemimpinan lokal 7. Koordinasi dan kerja sama antara 	<p>Hasil penelitian jelas menunjukkan pentingnya pendekatan masyarakat untuk pengembangan pariwisata dan bahwa pengembangan pariwisata pedesaan dan kewirausahaan tidak dapat bekerja tanpa partisipasi dan kolaborasi pelaku bisnis yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pariwisata.</p>

			<p>pengusaha pariwisata pedesaan</p> <p>8. Informasi dan bantuan teknis pengembangan pariwisata dan promosi</p> <p>9. Konvensi yang baik dan biro pengunjung</p> <p>10. Dukungan masyarakat luas untuk pariwisata.</p>	
13	<p>E U Jannah et al <i>("Community-Based Tourism Development at Gajah Mungkur Wonogiri Tourist Attraction")</i> IOP Conf. Ser.: Earth</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis SWOT - Pengembangan pariwisata berkelanjutan 3A : <ol style="list-style-type: none"> 1. Atraksi 2. Aksesibilitas 3. Amenitas - Faktor penghambat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan masyarakat 2. Penataan objek wisata 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, dan faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah rendahnya persepsi masyarakat tentang potensi dan peluang pariwisata, objek wisata hanya berpusat

	Environ. Sci. 145			<p>pada satu lokasi, dan penataan ruang,</p> <p>2. Berdasarkan analisis SWOT, arah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disarankan, karena mengakibatkan peningkatan objek wisata di Bendungan Serbaguna Wonogiri dalam bentuk komunitas keterlibatan (perencanaan-evaluasi), perencanaan tata ruang, dan memaksimalkan promosi.</p>
14	I Made Suniastha Amerta (2017)	Deskriptif Kualitatif	Peran pemangku dilihat dalam dua tahap, yaitu:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan pariwisata dapat dilihat dalam

	<p><i>(“The Role of Tourism Stakeholders at Jasri Tourism Village Development, Karangasem Regency”)</i></p> <p><i>International Journal of Social Sciences and Humanities</i> Vol. 1 No. 2, pg 20-28</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. peran pemangku kepentingan pariwisata dalam perencanaan awal; dan 2. peran pemangku kepentingan pariwisata dalam pengembangan. <p>Para pemangku kepentingan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakat lokal, 2. pemerintah, 3. para investor. 	<p>perencanaan awal Desa Wisata Jasri dan dalam pengembangan Desa Wisata Jasri. Para pemangku kepentingan pariwisata di Desa Jasri telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa pengembangan Desa Wisata Jasri akan berhasil dan mampu memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Desa Pakraman di Desa Jasri di masa depan.</p>
15	<p>L. Xue, et.al (2017)</p> <p><i>(“Tourism development and changing rural</i></p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Empat jenis perubahan identitas di masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transisi dari gagasan kesulitan pedesaan ke gagasan kemudahan pedesaan; 	<p>Dalam hasil penelitian ini temuan menunjukkan bahwa perubahan material yang ditimbulkan oleh pengembangan pariwisata dapat berdampak pada perubahan identitas</p>

	<p><i>identity in China”</i>)</p> <p><i>Annals of Tourism Research</i> 66 pg. 170–182</p>		<p>2. transisi yang sesuai dari rasa malu pedesaan ke rasa bangga pedesaan;</p> <p>3. peningkatan masyarakat secara keseluruhan; dan</p> <p>4. identitas pedesaan menjadi kurang "pedesaan."</p> <p>Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan identitas di Lembah Chongdu :</p> <p>1. kebijakan pemerintah yang bergeser,</p> <p>2. standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan</p> <p>3. adanya interaksi antara tamu dan tuan rumah.</p>	<p>penduduk desa.</p> <p>Bahwa pengembangan pariwisata telah memungkinkan penduduk setempat untuk mengubah persepsi mereka tentang diri mereka sendiri dan tempat di mana mereka tinggal. Khususnya, penduduk setempat sudah mulai menghargai aspek positif dari menjalani kehidupan pedesaan. Mereka mulai merasa bangga menjadi penduduk pedesaan, merangkul budaya pedesaan, dan menikmati keistimewaan menjadi penduduk pedesaan, khususnya penduduk Lembah Chongdu.</p>
16	VK Muzha,dkk	Deskriptif	Pengembangan agrowisata dengan	Dari hasil penelitian dapat diketahui

<p>(2013) “Pengembangan Agrowisata dengan Pendekatan Community Based Tourism (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu dan Kusuma Agrowisata Batu)”</p> <p>Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.3 Hal 131-154.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>pendekatan <i>community based tourism</i>, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan agrowisata 2. Keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan pengembangan agrowisata di kota Batu, 3. Sarana dan prasarana pendukung pengembangan Agrowisata di kota Batu, 4. Promosi agrowisata, 5. Mendorong tumbuhnya <i>partnership</i> (kemitraan). <p>-Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Internal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis, 2. Kondisi iklim, dan 3. Transportasi 	<p>bahwa program-program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan agrowisata yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu maupun pihak swasta yaitu Kusuma Agrowisata sudah berjalan optimal, banyak diadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat berkaitan dengan pengembangan agrowisata. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan melalui Pokdarwis, ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam suatu perencanaan walaupun tidak sepenuhnya. Promosi agrowisata dibuat semenarik mungkin agar wisatawan tertarik mengunjungi agrowisata</p>
--	-------------------	--	---

			<p>b. Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keramahatamahan penduduk, 2. Keamanan <p>-Faktor Penghambat :</p> <p>a. Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kemampuan dan keterbatasan wawasan masyarakat dalam hal kepariwisataan. <p>b Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mantapnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat, 2. Lemahnya kekuatan hukum. 	dengan berbagai <i>event-event</i> pariwisata
17	<p>H Krisnani,dkk (2015) “Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism” PROSIDING KS:</p>	Analisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Community Based Tourism</i> 2. Desa Wisata 	Sebuah desa wisata yang dibangun dengan konsep <i>Community Based Tourism</i> menjadi sebuah langkah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya untuk dapat mengelola pariwisatanya sendiri dan menjadikan desa mereka sebagai desa mandiri.

	RISSET & PKM. Vol 2, No 3. Hal 301-444 ISSN: 2442-4480			Pembangunan desa wisata tersebut sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki pariwisata tersebut secara bersama-sama, dengan seperti itu, masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan desa wisata di wilayahnya sendiri.
18	H. Hermawan (2017) <i>“Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya (Studi Community Based</i>	Penelitian Kuantitatif	Variabel Independent : 1. Daya Tarik Wisata 2. Keselamatan 3. Sarana Wisata Variabel Intervening : 1. Kepuasan Variabel Dependent :	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepuasan terbukti signifikan sebagai variabel yang mengintervensi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas wisatawan di Gunung Api Purba Nglanggren. Oleh karena itu, kunci dalam menciptakan loyalitas wisatawan dapat dicapai meningkatkan terlebih dahulu

	<p><i>Tourism di Gunung Api Purba Nglanggeran)</i>”</p> <p>Jurnal Media Wisata, Vol.15, No 1.</p>		<p>1. Loyalitas</p>	<p>menaikkan tingkat kepuasan wisatawan melalui peningkatan variabel-variabel bebasnya atau faktor-faktor penentu.</p> <p>Faktor penentu paling dominan yang terbukti mempengaruhi kepuasan dan loyalitas dalam penelitian ini adalah daya tarik wisata, dengan pola hubungan positif, yang berarti bahwa dengan meningkatkan daya tarik wisata maka akan meningkatkan kepuasan wisatawan, sehingga berdampak pada tercapainya loyalitas wisatawan. Sedangkan faktor penentu lain yang diuji, yaitu keselamatan dan sarana wisata hanya mampu mempengaruhi kepuasan, akan</p>
--	---	--	---------------------	---

				tetapi tidak terbukti signifikan mampu mempengaruhi loyalitas wisatawan, baik secara langsung maupun melalui perantara kepuasan.
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut M.Pfiffener dan Robert V. Presthus dalam Yuniningsih (2018) mendefinisikan administrasi publik adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Adanya unsur organisasi dan manajemen dalam definisi akuntan public, maka hal ini mengukuhkan pandangan bahwa pandangan administrasi publik adalah birokrasi atau sebaliknya birokrasi adalah administrasi publik. Pendapat lain disampaikan Turner dan Hulme dalam Yuniningsih (2018) menyebutkan 3 ciri administrasi publik yaitu :

- a. Mempunyai kekuatan memaksa
- b. Secara khusus berhubungan dengan hukum
- c. Dalam menjalankan kegiatannya bertumpu pada akuntabilitas publik.

Felix A. Nigro dan L. Lyod G. Nigro dalam Pasolong (2004:8) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi 3 cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan bagian dari proses politik, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Syafei (2006:25) mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk kerjasama yang disusun oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Khun dalam Surajiyo, (2005:83) mengemukakan bahwa paradigma adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoretis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.. Menurut Harmon dalam Moleong (2004: 49) bahwa paradigma adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen dalam Muslim (2015:78) menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi logis terkait, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.

Henry dalam Ikeanyibe (2017:3) menyatakan bahwa dalam publikasi barunya ada penambahan paradigma administrasi publik menjadi enam paradigma.

Paradigma I (1900-1926) dikenal sebagai Dikotomi Politik dan Administrasi Negara. Goodnow dalam Keban (2008:32) mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan kebijakan atau kehendak tersebut.

Paradigma II (1927-1937) disebut dengan prinsip-prinsip administrasi. Willoughby, Gullik dan Urwick dalam Keban (2008:32) memperkenalkan prinsip administrasi sebagai lokus administrasi publik. Prinsip tersebut adalah POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*).

Paradigma III (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara merupakan Ilmu Politik. Paradigma ini memiliki lokus pada birokrasi pemerintahan namun fokus paradigma ini terjadi kekaburan karena prinsip-prinsip administrasi pada masa itu masih mengandung banyak kelemahan, dan tidak memberi fokus dalam administrasi publik.

Paradigma IV (1956-1970) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Keban (2008:33) menjelaskan dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam.

Paradigma V (1970-sekarang) menyatakan dimana administrasi publik sebagai administrasi publik. Fokus dari administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik (Keban, 2008:33).

Paradigma VI (1990-sekarang), paradigma *governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan pimpinan politik untuk kesejahteraan warga negaranya, sebuah proses kompleks dimana beberapa sektor pemegang kekuasaan membuat dan menyebarkan kebijakan publik yang berdampak pada interaksi manusia dan kelembagaan, serta perkembangan ekonomi dan sosial. *Governance* berfokus pada peran aktor non pemerintah dan jaringan dalam penyediaan barang dan jasa publik. *Governance* melibatkan kemitraan dalam fungsi pemerintahan (Ikeanyibe, 2017:7).

Penelitian ini di kategorikan dalam paradigma *Governance* karena dalam penelitian ini akan melihat komponen-komponen apa saja yang berperan dalam pengembangan pariwisata yang tentunya dalam hal ini akan melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta.

1.5.4 Manajemen Publik

George Terry dalam Sukarna (2011:3), menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predeternined objectives through the efforts of otherpeople* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Malayu S.P Hasibuan (2017:9) juga

berpendapat bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dengan Prajudi (1982:124), yang mengemukakan manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Overman dalam Keban (2008:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific management*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*" bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi "*rational-instrumental*" pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan dipihak lain yang maksudnya disini ialah bahwa manajemen publik adalah sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan

pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya.

1. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
2. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
3. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
4. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.

5. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
6. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Dari penjelasan pakar di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dengan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

1.5.5 Pariwisata

Menurut etimologi kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “*travel*” dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. (Sinaga, 2010:12).

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata menurut Spillane (1987:20) adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan / keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu.

E. Guyer Freuler dalam Irawan (2010:11), merumuskan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan sebagai berikut :

“...Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan ”.

Menurut Yoeti dalam Yuniningsih (2018) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.

3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 4 menjelaskan tujuan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa; Memupuk rasa cinta tanah air;
8. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
9. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Dari beberapa penjabaran beberapa ahli di atas mengenai pariwisata, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih ke suatu tempat diluar tempat tinggalnya untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kesenangan maupun kepentingan lainnya.

1.5.6 Pengembangan Pariwisata

Munasef (1995:1) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan wisatawan.

Menurut Pearce (1981:12) Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”.

Menurut Swarbrooke (1996:99), pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata adalah usaha-usaha yg terkoordinir dilakukan untuk melengkapi pelayanan, infrastruktur guna untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

Pengembangan pariwisata di Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI tahun 2015-2019 yakni:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;
2. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar;

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Menurut Pearce dalam Santoso (2006:30) unsur-unsur pengembangan pariwisata meliputi:

1. Atraksi

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau, obyek buatan manusia museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya, ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya.

2. Transportasi

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam dan waktu yang lebih singkat.

3. Akomodasi

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu terbatas.

4. Fasilitas Pelayanan

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari penjual makanan, warung minumjajanan; kemudian jasa-jasa perdagangan pramuniagapembantu penjualan, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain; selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan toko pakaian, toko perabot rumah tangga; lalu jasa

yang menyangkut keamanan dan keselamatan dokter, apotek, polisi, pemadam kebakaran; dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

5. Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat dapat digunakan bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi jalan, pelabuhan, jalan kereta api tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

Sugiama (2014:72) mengatakan bahwa komponen penunjang wisata adalah komponen kepariwisataan yang harus ada didalam destinasi wisata. Komponen kepariwisataan tersebut adalah 4A yaitu *Attraction, Amenities, Ancilliary* dan *Accesibility*.

Menurut Hadiwijoyo (2012:69) komponen pengembangan pariwisata yang harus ada adalah *Attraction* dan *Accomodation*. *Attraction*, seluruh aktivitas penduduk beserta lingkungan fisik desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa, dan hal spesifik lainnya (Nuryati, 1993: 1-2). *Accommodation, homestay* yang merupakan sebagian dari rumah penduduk atau bangunan yang dibangun dengan konsep tempat tinggal penduduk.

Sedangkan menurut Brown n Stange (2015) dalam bukunya yang berjudul *Tourism Destination Management* mengemukakan bahwa komponen dalam pengembangan pariwisata terdiri dari ini adalah 3A yaitu *Attraction, Activity dan Accesibility*.

Buhalis (2000:98) mengemukakan teori yang berbeda bahwa komponen pengembangan pariwisata terdiri dari 6A yaitu *Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities* dan *Available Package*.

Pada penelitian ini penulis melakukan sintesis teori sehingga didapatkan 6 Komponen Pengembangan Pariwisata yaitu *Attraction, Accomodation, Amenities, Ancillary services, Activity* dan *Accessibilities*.

1. *Attraction* (Atraksi)

Adalah segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata. Atraksi terdiri dari apa yang pertama kali membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke sebuah kawasan. Atraksi dapat didasarkan pada sumber daya alam yang memiliki bentuk ciri-ciri fisik alam, dan keindahan kawasan itu sendiri. Selain itu, budaya juga dapat menjadi atraksi untuk menarik minat wisatawan datang, seperti hal-hal yang besejarah, agama, cara hidup masyarakat, tata cara pemerintahan, dan tradisi-tradisi masyarakat baik dimasa lampau maupun di masa sekarang. Hampir setiap destinasi memiliki atraksi khusus yang tidak dapat dimiliki oleh destinasi lainnya.

2. *Accessibilities* (Akses)

Akses mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata, sehingga harus tersedia jasa seperti penyewaan kendaraan dan transportasi lokal, rute atau pola perjalanan (Cooper dkk, 2000). Menurut Sugiama (2011) aksesibilitas adalah tingkat intensitas suatu daerah tujuan wisata atau destinasi dapat dijangkau oleh wisatawan. Fasilitas dalam aksesibilitas seperti jalan raya, rel kereta api, jalan tol, terminal, stasiun kereta api, dan kendaraan roda empat. Menurut Brown dan Stange (2015) Akses adalah bagaimana seseorang untuk mencapai tujuan dari tempat asalnya. Apakah aksesnya mudah atau sulit.

3. *Amenities (fasilitas pendukung)*

Amenities adalah berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan di destinasi wisata. *Amenities* meliputi beragam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*), tempat hiburan, tempat perbelanjaan (*retailing*), dan layanan lainnya seperti bank, rumah sakit, keamanan dan asuransi (Cooper dkk, 2000). Menurut Inskeep dalam Hadiwijoyo (2012:59-60) fasilitas (*facilities*) dan pelayanan lainnya (*other services*) di destinasi bisa terdiri dari biro perjalanan wisata, restaurant, retail outlet kerajinan tangan, *souvenir*, keunikan, keamanan yang baik, bank, penukaran uang (*money changer*), (*tourist information office*), rumah sakit, bar, tempat kecantikan. Setiap destinasi memiliki fasilitas yang berbeda,

namun untuk melayani kebutuhan dasar wisatawan yang berkunjung destinasi melengkapinya sesuai dengan karakteristik destinasi tersebut.

4. *Accommodation* (Penginapan)

Akomodasi dapat diartikan sebagai penginapan yang tentunya di satu destinasi dengan destinasi lainnya akan berbeda. Akomodasi yang umum dikenal adalah hotel dengan beragam fasilitas didalamnya. Akomodasi di desa wisata berbeda dengan akomodasi di destinasi lain. Akomodasi di desa wisata biasanya terdiri dari sebagian tempat tinggal para penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk atau biasa dikenal dengan *homestay*. Akomodasi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan wisata di destinasi dapat terletak di lokasi desa wisata tersebut atau berada di dekat desa wisata. Jenis akomodasi di desa wisata dapat berupa bumi perkemahan, villa atau sebuah pondok wisata (Hadiwijoyo,2012:68).

5. *Activities* (aktivitas)

Aktivitas berhubungan dengan kegiatan di destinasi yang akan memberikan pengalaman (*experience*) bagi wisatawan. Setiap destinasi memiliki aktivitas yang berbeda sesuai dengan karakteristik destinasi wisata tersebut (Brown and Stange, 2015). Aktivitas wisata di destinasi merupakan kegiatan yang salah satunya menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke destinasi.

Begitu juga dengan desa wisata, jenis aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan karakteristik desa tersebut. Aktivitas yang umumnya dilakukan di desa wisata adalah mengikuti kegiatan kehidupan sehari-hari desa wisata.

6. *Ancillary services* (Layanan Pendukung)

Ancillary adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata (Cooper dkk, 2000). Hal yang sama juga disampaikan oleh Wargenau dan Deborah dalam Sugiana (2011) bahwa *ancillary* adalah organisasi pengelola destinasi wisata. Organisasi pemerintah, asosiasi kepariwisataan, *tour operator* dan lain-lain. Dalam hal ini organisasi dapat berupa kebijakan dan dukungan yang diberikan pemerintah atau organisasi untuk terselenggaranya kegiatan wisata. Sama halnya dengan desa wisata, tentunya penyelenggaraan desa wisata didukung oleh kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat untuk terselenggaranya kegiatan wisata.

1.5.7 Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan,

maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik pedesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 1).

Yeoti dalam Zakaria (2014: 245) mengemukakan bahwa Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada disuatu desa wisata.

Putra (2006:2) dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Desa Wisata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu kawasan atau wilayah pedesaan yang bisa dimanfaatkan atas dasar kemampuan beberapa unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan keseluruhan suasana dari pedesaan yang memilikan tema keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat yang mempunyai ciri khas arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian kegiatan dan aktivitas pariwisata.

Menurut Chafid Fandeli dalam Taolin (2016:97) secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Priasukmana dan Mulyadin (2001:38) yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan.

Terdapat beberapa tujuan dan sasaran pembangunan desa wisata menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001:38) yaitu sebagai berikut:

1. Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif.
2. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat.

3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001:38) penetapan suatu desa menjadi desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:

1. Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mempermudah wisatawan untuk berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Harus memiliki obyek-obyek menarik yang dapat berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat serta aparaturnya memberikan dukungan penuh terhadap desa wisata dan wisatawan yang berkunjung kedesaanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang cukup memadai.
6. Memiliki iklim yang sejuk atau dingin.
7. Memiliki hubungan dengan obyek wisata lainnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Ada beberapa komponen penting yang harus terdapat dalam suatu desa wisata menurut Gumelar (2010:4) :

1. Keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa

3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang memiliki potensi dan daya tarik yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu objek wisata yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dan akan menjadikan desa itu berkembang.

1.5.8 Pengembangan Desa Wisata

Pearce dalam Arida (2017:3) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan

dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

Gumelar (2010:5) mengatakan tujuan pengembangan kawasan desa wisata adalah:

1. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
3. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka, mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
5. Mengembangkan produk wisata desa.

Sasaran yang akan dicapai dengan adanya pengembangan desa wisata menurut Gumelar (2010:5) yaitu :

- a. Tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan / ramah lingkungan.
- b. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan

lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya.

- c. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keselamatan pengunjung.
- d. Terwujudnya kawasan desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional.
- e. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan bahan mentah yang ada di desa.

Gumelar (2010:2) menyatakan unsur penting dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan yaitu pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan kelompok pengusaha setempat. Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain, yaitu:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat,
2. Menguntungkan masyarakat setempat,

3. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat,
4. Melibatkan masyarakat setempat,
5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya,
6. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
7. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
8. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
9. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjabaran ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata adalah suatu usaha yang terkoordinir yang dilakukan untuk melengkapi pelayanan dan infrastruktur desa wisata guna untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

1.5.9 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata

Rezza Abdy Pradana (2016) mengemukakan adanya faktor penghambat program pembangunan dalam pengembangan Desa Wisata, yakni :

1. Konflik internal, konflik yang terjadi antar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengurus yang tidak dapat mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah.
2. Pengelolaan dana yang kurang tepat, penggunaan dana yang tidak tepat untuk membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
3. Koordinasi yang kurang baik, koordinasi antar Kelompok Sadar Wisata dengan dinas-dinas yang terkait jika tidak dilakukan dengan baik akan berpengaruh pada promosi wisata.
4. Kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya promosi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat sehingga akan berpengaruh pada kunjungan wisatawan.
5. Kurangnya fasilitas pendukung, masih minimnya fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan desa wisata.

Menurut Sunaryo (2013) Faktor Pendukung dan Penghambat suatu produk wisata (*tourism supply side*) yang biasanya berwujud sistem destinasi pariwisata akan terdiri atau menawarkan paling tidak beberapa komponen pokok sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung.
 - a. Daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya atau minat khusus.
 - b. Akomodasi atau amenitas, aksesibilitas dan transportasi (udara, darat, dan laut).
 - c. Fasilitas umum.
 - d. Fasilitas pendukung pariwisata.
 - e. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) dari suatu destinasi.

2. Faktor Penghambat
 - a. Belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek prasarana dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung untuk pengembangan objek wisata di daerah.
 - b. Keterbatasan prasarana dan sarana serta pengelolaan terhadap potensi wisata masih belum optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata.

Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh 3 faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoeti dalam Yuniningsih (2018) , sebagai berikut :

2. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.

3. Adanya fasilitas *Accessibilities* yaitu sarana dan prasarana, sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.

Terjadinya fasilitas *amenities* yaitu sasaran kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Widiastuti (2019:7) mengemukakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata. Faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Pendorong

Terdapat faktor internal dan eksternal yang mendorong pengembangan Desa Wisata :

1. Faktor internal

1. Berupa kesadaran dan kemauan masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata.
2. Banyaknya potensi yang ada di Desa Wisata berupa potensi ekonomi maupun potensi lingkungan.
3. Terdapat banyak atraksi wisata.

2. Faktor Eksternal

1. Dukungan dan bantuan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi yang sangat berperan terhadap kemajuan Desa Wisata.

- b. Faktor Penghambat

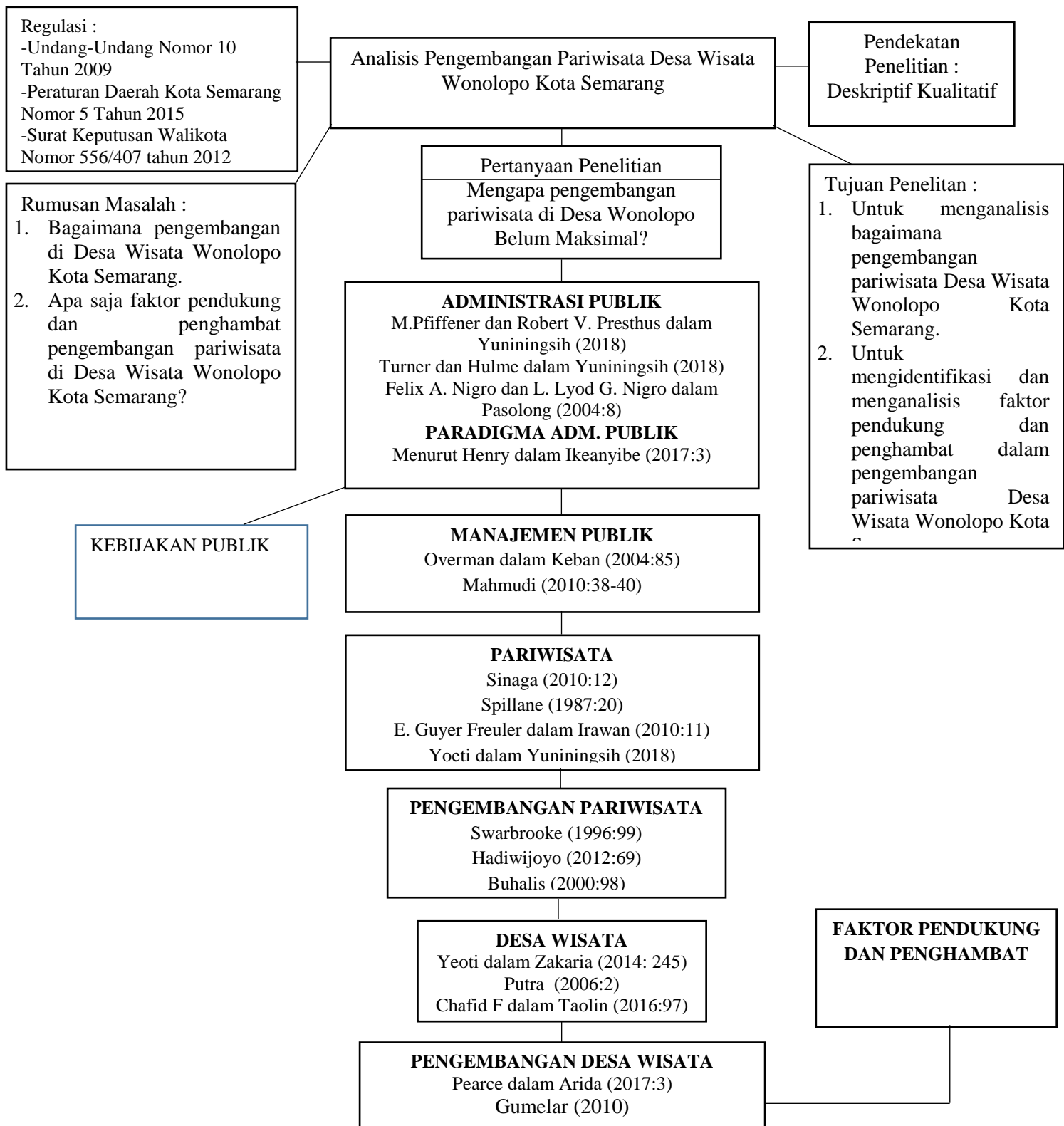
1. Keterbatasan SDM, masih ada keterbatasan warga belum mau terlibat dalam kepengurusan desa wisata.
2. Terjadinya Konflik. Konflik yang ada berupa perbedaan persepsi antar anggota masyarakat, benturan kepentingan antara anggota masyarakat serta pengurus desa wisata yang menghambat pelaksanaan program-program desa wisata. Konflik adalah hal umum terjadi dalam suatu kelompok. Konflik dapat bersifat membangun maupun merusak. Terjadinya konflik dapat menurunkan semangat pengelola Desa Wisata.

Menurut Heri (2011:25), pengembangan daya tarik wisata pasti tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini:

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata
2. Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata
3. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait
4. Kurangnya kerja sama dengan investor
5. Belum terdapat sistem promosi yang menarik
6. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata
7. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

Nurhadi dkk, (2013:33) mengemukakan bahwa faktor penghambat pengembangan daya tarik wisata juga berdasarkan pada letak geografis suatu daya tarik wisata seperti wisata alam kadang mengalami permasalahan dengan bencana alam juga mengenai status kepemilikan lahan yang akan menghambat program-program pengembangan daya tarik wisata, kurangnya kerja sama dengan investor (pihak ketiga) yang menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Hal ini menjadi kendala karena jika adanya kerja sama maka akan membantu dalam masalah dana karena dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan program-program yang telah dirumuskan bersama.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Yuniningsih (2018), Ikeanyibe (2017), Keban (2004), Sinaga(2010), Spillane (1987), Irawan (2010), Swarbrooke (1996), Hadiwijoyo (2012), Buhalis (2000), Zakaria (2014), Putra (2006), Taolin (2016), Arida (2017), Gumelar (2010).

1.7 Definisi Konsep

1. *Pengembangan pariwisata* adalah usaha-usaha yang terkoordinir dilakukan untuk melengkapi pelayanan dan infrastruktur guna untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Fenomena yang akan diamati dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. *Attraction* (Atraksi)

Adalah segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata.

2. *Accessibilities* (Akses) :

Akses mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata.

3. *Amenities* (Fasilitas Pendukung) :

Amenities adalah berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan di destinasi wisata.

4. *Accommodation* (Penginapan) :

Akomodasi dapat diartikan sebagai penginapan yang tersedia, di satu destinasi dengan destinasi lainnya akan berbeda.

5. *Activity* (Aktivitas) :

Aktivitas berhubungan dengan kegiatan di destinasi yang akan memberikan pengalaman (*experience*) bagi wisatawan.

6. *Ancillary service* (Layanan Pendukung) :

Ancillary service atau layanan pendukung adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

1. Banyaknya potensi yang ada;
2. Terdapat banyak atraksi wisata;
3. Kesadaran dan kemauan penduduk setempat untuk mengembangkan Desa Wisata;
4. Kurangnya bentuk kerjasama dengan pemerintah maupun investor;
5. Lahan hijau yang semakin berkurang;

1.8 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian menjelaskan apa saja yang akan digali peneliti dalam menggambarkan persoalan-persoalan di lapangan sebagai objek penelitian. Fenomena penelitian digunakan agar mempermudah peneliti dalam alur pikir dan penyesuaian teori yang telah dipaparkan oleh peneliti, adapun fenomena dan indikasi yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Fenomena Penelitian

	Fenomena	Gejala yang diamati
ANALISIS KOMPONEN PENGEMBANGAN PARIWISATA.	<p><i>a. Attraction (Atraksi):</i> Adalah segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal menarik yang terdapat di Desa Wisata Wonolopo; 2. Kesan pertama yang ditonjolkan pada Desa Wisata Wonolopo untuk wisatawan yang berkunjung; 3. Bentuk Keanekaragaman hayati yang ada di Desa Wisata Wonolopo; 4. Dasar dari kegiatan atraksi terkait dengan Sumber Daya Alam, Budaya, Sejarah, Keagamaan, Tradisi yang ada di Desa Wisata Wonolopo; 5. Atraksi wisata yang harus dikembangkan di Desa Wisata Wonolopo; 6. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan atraksi wisata di Desa Wisata Wonolopo;
	<p><i>b. Accessibilities (Akses):</i> Akses mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan transportasi di Desa Wisata Wonolopo; 2. Keterjangkauan lokasi Desa Wisata Wonolopo; 3. Akses lokasi menuju Desa Wisata Wonolopo; 4. Kondisi jalan untuk menuju ke Desa Wisata Wonolopo; 5. Ketersediaan rambu petunjuk arah untuk ke Desa Wisata Wonolopo; 6. Akses wisata yang harus dikembangkan di Desa Wisata Wonolopo.;
	<p><i>a. Amenities (Fasilitas Pendukung)</i> <i>Amenities</i> adalah berbagai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung seperti warung, pasar, bank, rumah sakit, toilet, tempat ibadah, restoran, salon, <i>money changer</i> di Desa Wisata Wonolopo; 2. Ketersediaan kantor informasi di Desa Wisata Wonolopo;

	<p>fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan di destinasi wisata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan toko souvenir di Desa Wisata Wonolopo; 4. Fasilitas pendukung wisata yang harus dikembangkan di Desa Wisata Wonolopo;
	<p><i>a. Accommodation</i> (Penginapan) Akomodasi dapat diartikan sebagai penginapan yang tersedia di satu destinasi dengan destinasi lainnya akan berbeda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Hotel/motel di Desa Wisata Wonolopo; 2. Ketersediaan <i>homestay</i> di Desa Wisata Wonolopo; 3. Ketersediaan tempat perkemahan di Desa Wisata Wonolopo; 4. Akomodasi yang harus dikembangkan di Desa Wisata Wonolopo;
	<p><i>b. Activities</i> (Aktivitas) Aktifitas berhubungan dengan kegiatan di destinasi yang akan memberikan pengalaman (<i>experience</i>) bagi wisatawan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan di destinasi wisata Desa Wisata Wonolopo; 2. Kegiatan wisata yang harus dikembangkan di Desa Wisata Wonolopo; 3. Pengembangan aktivitas wisata yang akan dilakukan untuk kedepannya;

	<p>c. <i>Ancillary service</i> (Layanan Tambahan) adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh pengelola desa pengunjung di Desa Wisata Wonolopo; 2. Bentuk promosi yang dilakukan pengelola Desa Wisata Wonolopo; 3. Paket wisata yang disediakan oleh pengelola Desa Wisata Wonolopo; 4. Kerjasama antara pengelola Desa Wisata Wonolopo dengan Biro <i>tour</i>; 5. Ketersediaan Pemandu Wisata di Desa Wisata Wonolopo; 6. Kelengkapan informasi yang diberikan pengelola destinasi wisata; 7. Pengembangan layanan tambahan yang akan dikembangkan oleh pengelola desa wisata;
<p>FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya potensi yang ada di Desa Wisata 2. Terdapat banyak atraksi wisata 3. Kesadaran dan kemauan masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata 4. Kurangnya bentuk kerjasama dengan pemerintah maupun investor 5. Lahan hijau yang semakin berkurang 	

1.9 Metode Penelitian

1.9.2 Desain Penelitian

Metode penelitian harus ditentukan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitiannya agar memberikan gambaran serta arahan dan pedoman dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016:2) mengungkapkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dapat dijadikan pedoman bagi penulis dan memudahkan penulis dalam mengarahkan penelitiannya, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris yang berarti cara-cara yang dilakukan dapat dimengerti oleh manusia, sehingga oranglain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang tentu bersifat logis. Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan (Sugioyono, 2008:3).

1.9.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2007:4). Melalui penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan komponen pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

1.9.4 Situs Penelitian

Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah salah satu desa wisata yang terletak di Kota Semarang yaitu Desa Wisata Wonolopo yang beralamat pada Jalan Tegalsari Raya Galbon No.1, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.9.5 Subjek Penelitian

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Adapun subyek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lurah Wonolopo
2. Ketua Pokdarwis Manggar Desa Wisata Wonolopo
3. Ketua Pokdarwis Wonolopo Desa Wisata Wonolopo
4. Sekretaris Pokarwis Wonolopo Desa Wisata Wonolopo
5. Masyarakat Wonolopo

1.9.6 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dari yang berupa wawancara yang dilakukan dengan pemangku jabatan Kelurahan Wonolopo, Pokdarwis Wonolopo, Pokdarwis Manggar dan beberapa warga masyarakat. Selain itu data yang digunakan adalah data sekunder, dalam hal ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen-dokumen yang didapatkan dari Desa Wisata Wonolopo Semarang.

1.9.7 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan objek penelitian, data tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer yang digunakan peneliti berupa wawancara dari beberapa narasumber dari pejabat pemerintah desa, pengelola Pokdarwis dan masyarakat Kelurahan Wonolopo.

c. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan masalah penelitian tetapi data ini mendukung untuk memperoleh data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, situs internet, kepustakaan, jurnal baik berupa teori maupun data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarainya. Teknik wawancara digunakan karena dianggap paling bermanfaat untuk memperoleh informasi dari responden. Melalui wawancara, responden diberi kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya, serta menceritakan pengalaman dan

pengamatan mereka sendiri. Terdapat daftar pertanyaan digunakan sebagai pemandu wawancara. Apabila ada pendapat atau cerita menarik yang diungkapkan oleh responden sehingga dapat digunakan untuk memperoleh data yang lebih rinci.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian teknik dokumentasi juga berguna untuk melengkapi kekurangan yang diperoleh dari data primer.

3. Observasi Data

Observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Teknik ini digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan demikian teknik ini digunakan untuk merekam data-data primer berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu pada

lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung melihat lokasi penelitian yaitu pada Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Adapun instrumen yang digunakan adalah catatan-catatan lapangan dan kamera foto.

1.9.8 Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sample misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Informan dalam hal ini di butuhkan untuk mengetahui pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

1.9.9 Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau

mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "*final*" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Untuk menganalisis data yang ada digunakan berbagai macam jenis teknik analisis data. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang ada yang digunakan untuk menganalisis data penelitian kualitatif:

1. Analisis Domain

Analisis domain adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian (Gunawan,2014:212). Caranya yaitu dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah yang ada di dalam data tersebut. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek peneliti secara umum tentang objek penelitian.

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam dan membaginya lagi menjadi subdomain dan dari subdomain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada yang tersisa. Pada tahap analisis, peneliti bisa mendalami domain dan sub domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam (Gunawan,2014:213).

3. Analisis Komponensial

Analisis komponensial peneliti mencoba mengontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah kesurupan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras (Sugiyono, 2012:114). Adapun jenis data yang dianalisis dengan menggunakan analisis komponensial adalah jenis data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah terseleksi.

4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema atau *discovering culture themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Sugiyono,2012:114). Analisis ini berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain yang dianalisis sehingga membentuk satu kesatuan yang holistik, yang akhirnya menampakkan tema yang dominan dan mana yang kurang dominan (Gunawan,2014:214). Pada tahap ini yang perlu dilakukan peneliti adalah: membaca secara cermat keseluruhan catatan penting, memberikan kode pada topik-topik penting, menyusun tipologi dan membaca

pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian.

Dari keempat teknik analisis di atas, peneliti menggunakan teknik analisis komponensial karena peneliti menganalisis jenis data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah terseleksi.

2. Interpretasi Data

Moleong (2007:151) menyatakan bahwa interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh makna yang mendalam terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Pembahasan dari hasil penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat dari lapangan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melakukan deskriptif analisis.

1.9.10 Kualitas Data

Teknik untuk menguji kualitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut William (dalam Sugiyono, 2008: 273) adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Proses pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dapat dipahami berdasarkan atas apa yang dimaksud informan. Untuk itu maka dapat dilakukan cara berikut:

1. Melakukan wawancara dengan informan;

2. Melakukan perpaduan antara hasil wawancara informan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan;
3. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
4. Membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan informan yang lainnya.